



BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
SEMESTER I TA 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01



**LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2023**

Jl. Bung Tomo, No. 136, Samarinda Seberang

Telp. 0541-260659 Fax. 0541-262062

Samarinda - Kalimantan Timur 75132

e-mail : ptun.samarinda@gmail.com

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di

dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Kuasa Pengguna yang kami susun untuk Periode Semesteran per 30 Juni 2023 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Samarinda, Juli 2023

Kuasa Pengguna Barang



EPI RANDABUNGA RUNGNGU, S.E.

NIP. 19790204 200502 2 001

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	6
3.1. Aset Tetap	7
3.1.1. Tanah	7
3.1.2. Gedung dan Bangunan	7
3.1.3. Peralatan dan Mesin	8
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	8
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	9
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	10
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	15
4.2.2. Barang Persediaan	16
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	17
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	17

V.	Kendala dan Saran	19
5.1.	Kendala	19
5.2.	Saran	19
VI.	Penutup	20

Lampiran

- A. Catatan Ringkas Barang Milik Negara**
- B. Laporan Barang Intrakomptabel**
- C. Laporan Barang Ekstrakomptabel**
- D. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel**
- E. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan**
- F. Laporan Aset Tak Berwujud**
- G. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik**
- H. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca**
- I. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan**
- J. Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPKNL**
- K. Laporan Kondisi Barang**
- L. Data Pendukung Lainnya**

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangkai pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Penswertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara.
17. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekonsiliasi internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data (ADK Backup) SIMAK-BMN dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SIMAK-

BMN, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementrian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda periode Semester I per 30 Juni 2023 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara..

Total Nilai aset/ BMN yang tercatat di Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.24.420.700.896,- (*dua puluh empat miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

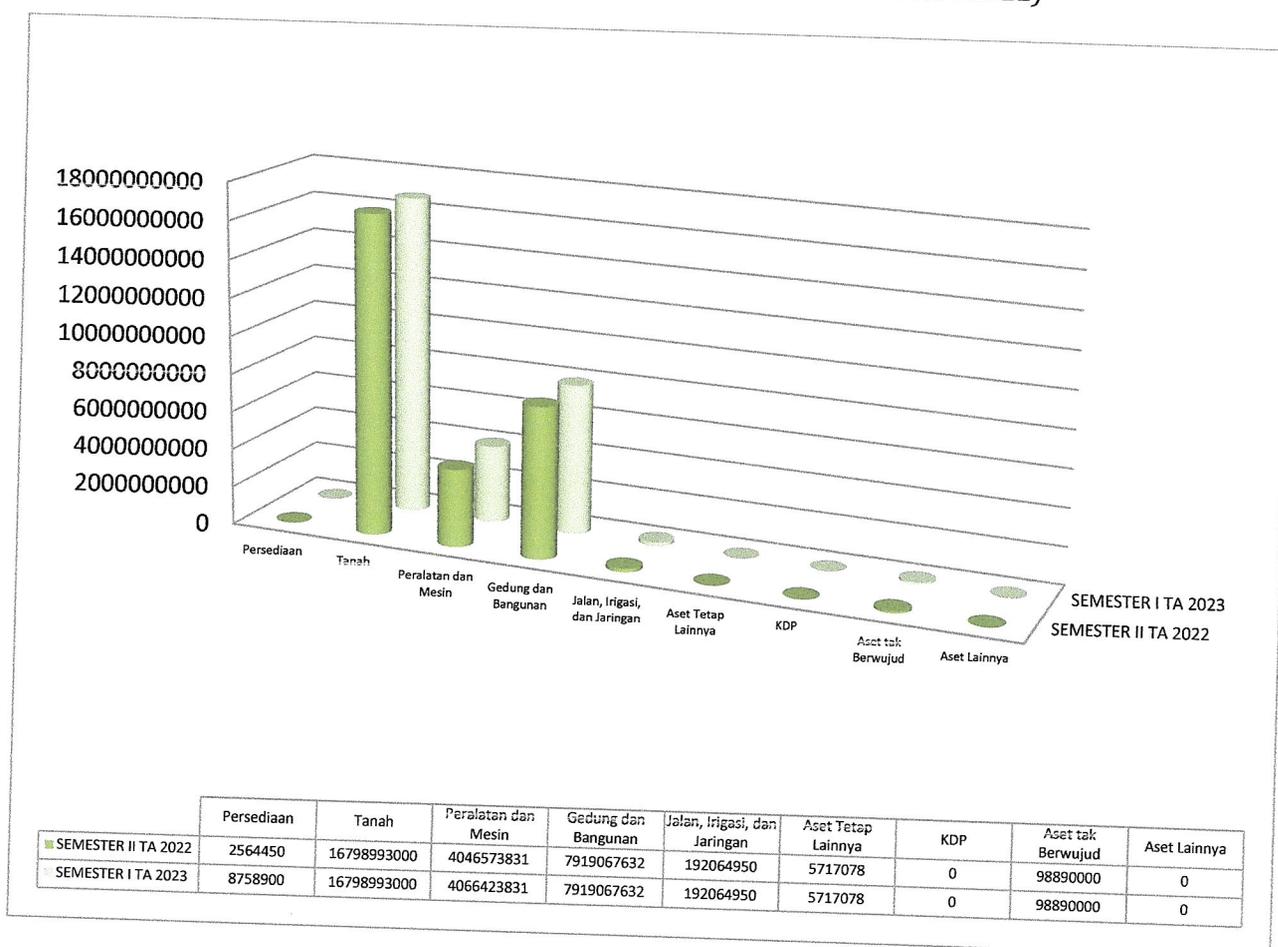
NAMA ASET	NILAI RUPIAH
Persediaan	8.758.900
Tanah	16.798.993.000
Peralatan dan Mesin	4.066.423.831
Gedung dan Bangunan	7.919.067.632
Jaringan	192.064.950
Aset Tetap Lainnya	5.717.078
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
<i>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</i>	<i>(3.406.576.381)</i>
<i>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</i>	<i>(1.132.537.558)</i>
<i>Akumulasi Penyusutan Jaringan</i>	<i>(31.210.556)</i>
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</i>	<i>0</i>
Aset Tak Berwujud	98.890.000
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
<i>Amortisasi Aset Tak Berwujud</i>	<i>(98.890.000)</i>
<i>Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Tetap Lainnya</i>	<i>0</i>
Total	24.420.700.896

Berikut adalah tabel dan grafik perbandingan nilai BMN periode Semester II Tahun Anggaran 2022 dengan periode Semester I Tahun Anggaran 2023.

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
SEMESTER II TA 2022 DAN SEMESTER I 2023
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)

NAMA ASET	SEMESTER II TA 2022	SEMESTER I TA 2023
Persediaan	2.564.450	8.758.900
Tanah	16.798.993.000	16.798.993.000
Peralatan dan Mesin	4.046.573.831	4.066.423.831
Gedung dan Bangunan	7.919.067.632	7.919.067.632
Jaringan	192.064.950	192.064.950
Aset Tetap Lainnya	5.717.078	5.717.078
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
<i>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</i>	<i>(3.271.766.738)</i>	<i>(3.406.576.381)</i>
<i>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</i>	<i>(1.038.685.919)</i>	<i>(1.132.537.558)</i>
<i>Akumulasi Penyusutan Jaringan</i>	<i>(28.809.744)</i>	<i>(31.210.556)</i>
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Aset Tak Berwujud	98.890.000	98.890.000
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
<i>Amortisasi Aset Tak Berwujud</i>	<i>(98.890.000)</i>	<i>(98.890.000)</i>
<i>Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Tetap Lainnya</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ekstrakomptabel</i>	<i>103.626.500</i>	<i>103.626.500</i>
<i>Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel</i>	<i>(36.298.013)</i>	<i>(41.889.020)</i>
Totai	24.693.047.027	24.482.438.376

GRAFIK PERBANDINGAN
NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
SEMESTER II TA 2022 DAN SEMESTER I TA 2023
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

- a. Nilai Aset Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.16.798.993.000,- (*enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) dan tidak terdapat mutasi.
- b. Nilai Peralatan dan mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 31 Desember 2022 sebesar Rp.4.066.423.831,- (*empat miliar enam puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah*), terdapat mutasi tambah sebesar Rp.19.850.000 (*sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan tanpa mutasi kurang.

- c. Nilai Gedung dan bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.7.919.067.632,- (*tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*) dan tidak terdapat mutasi.
- d. Nilai Jalan, irigasi, dan jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.192.064.950,- (*seratus sembilan puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) dan tidak terdapat mutasi.
- e. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.5.717.078,- (*lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh puluh delapan rupiah*) dan tidak terdapat mutasi.
- f. Nilai Aset tak Berwujud pada Nilai Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.98.890.000,- (*sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dan tidak terdapat mutasi.
- g. Tidak terdapat Nilai Aset Lainnya pada Nilai Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023.

4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.8.758.900,- (*delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah*), terdapat mutasi tambah sebesar Rp.6.194.450,- (*enam juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
SEMESTER II TA 2022 DAN SEMESTER I TA 2023

PERSEDIAAN	SEMESTER II TA 2022	SEMESTER I TA 2023
Barang Konsumsi	2.564.450	8.758.900
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Tidak terdapat nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Nilai Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023.

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Nilai neraca pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.24.420.700.896,- (*dua puluh empat miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*). Tidak terdapat selisih Nilai Neraca pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I TA 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 dan Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023, sehingga tercapai keseimbangan (sama).

Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda periode Semester I Tahun Anggaran 2023 per 30 Juni 2023.

*TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB DAN UAKPA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
TA 2023 PER 30 JUNI 2023*

NAMA ASET	UAKPB	UAKPA
Persediaan	8.758.900	8.758.900
Tanah	16.798.993.000	16.798.993.000
Peralatan dan Mesin	4.066.423.831	4.066.423.831
Gedung dan Bangunan	7.919.067.632	7.919.067.632
Jaringan	192.064.950	192.064.950
Aset Tetap Lainnya	5.717.078	5.717.078
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
<i>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</i>	<i>(3.406.576.381)</i>	<i>(3.406.576.381)</i>
<i>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</i>	<i>(1.132.537.558)</i>	<i>(1.132.537.558)</i>
<i>Akumulasi Penyusutan Jaringan</i>	<i>(31.210.556)</i>	<i>(31.210.556)</i>
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Aset Tak Berwujud	98.890.000	98.890.000
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
<i>Amortisasi Aset Tak Berwujud</i>	<i>(98.890.000)</i>	<i>(98.890.000)</i>
<i>Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Tetap Lainnya</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total	24.420.700.896	24.420.700.896

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

Kendala dalam penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 yaitu :

1. Adanya perubahan / perbaikan aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN di tingkat satuan kerja dan pembantu pengguna wilayah pada saat / waktu masa rekonsiliasi, sementara waktu rekonsiliasi dan penyusunan laporan terbatas .
2. Adanya perubahan peraturan-peraturan mengenai kebijakan terkaat pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara yang sudah dekat dengan waktu rekonsiliasi dan pelaporan.

5.2. SARAN

Saran yang dapat disampaikan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023, yaitu :

1. Aplikasi SIMAK BMN harus terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan guna memudahkan satuan kerja dalam melakukan pencatatan, koreksi data dan pelaporan barang milik negara dengan minim *bugs* (lubang kesalahan) dengan memperhatikan pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi antara satuan kerja dengan KPKNL maupun dengan Kanwil DJKN.
2. Komdanas sebagai komunikasi data nasional antara satker dengan koordinator wilayah juga dengan pusat perlu diperbaharui dan terus dikembangkan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada untuk kemudahan satuan kerja dalam melakukan penyusunan laporan barang milik negara.

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2021 bisa dipertahankan pada tahun 2022 dan tahun-tahun mendatang serta dapat terus ditingkatkan kualitas pelaporan keuangan dan barang dengan meningkatkan Profesionalitas SDM di bidang keuangan dan barang dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN), dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

LAMPIRAN I

*CATATAN RINGKAS
BARANG MILIK NEGARA*

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
BAGIAN ANGGARAN 005.01
SEMESTER I TA 2023

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 7) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
- 11) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 12) Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
- 13) Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 16) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semesteran per 30 Juni 2023.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 ini adalah sebesar Rp.24.482.438.412,- (*dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah*), saldo awal laporan per 01 Januari 2023 sebesar Rp.24.693.047.027,- (*dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama periode semesteran per 30 Juni 2023 sebesar Rp.(210.608.615,-) (*minus dua ratus sepuluh juta enam ratus delapan ribu enam ratus lima belas rupiah*).

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara per 30 Juni 2023

1. Saldo Awal Semester I TA 2023

Nilai BMN per 01 Januari 2023 menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebesar Rp.24.693.047.027,- (*dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp.24.625.718.540,- (*dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh rupiah*), nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp.67.328.487,- (*enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) dan nilai Aset Lancar sebesar Rp.2.564.450,- (*dua juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

Tidak terdapat perubahan penyajian saldo awal per 01 Januari 2023 dengan penyajian saldo akhir periode sebelumnya per 31 Desember 2022 yang menjadi saldo awal periode berjalan.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.8.758.900,- (*delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 01 Januari 2023 sebesar Rp.2.564.450,- (*dua juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp.(6.194.450),- (*minus enam juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	2.564.450	(6.194.450)	8.758.900
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0
Suku Cadang	0	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku	0	0	0
Barang dalam Proses	0	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah	2.564.450	(6.194.450)	8.758.900

Tidak terdapat barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang.

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.16.798.993.000,- (*enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 4.900 m² dengan nilai sebesar Rp.16.798.993.000,- (*enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) dan tidak terdapat mutasi.

Dari jumlah/ nilai tanah di atas, tidak terdapat bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak terdapat bidang tanah dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan.

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
	(m ²)	(Rp)
Baik	4900	16.798.993.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tidak terdapat tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tidak terdapat permasalahan pada BMN berupa Tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Gabungan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.4.114.234.331,- (*empat miliar seratus empat belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.4.094.384.331,- (*empat miliar sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*), terdapat mutasi tambah sebesar Rp.19.850.000 (*sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan tanpa mutasi kurang.

Saldo Gabungan Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 tersebut terdiri dari Saldo Intrakomptabel sebesar Rp.4.066.423.831,- (*empat miliar enam puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah*), dan Saldo Ekstrakomptabel sebesar Rp.47.810.500,- (*empat puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*).

1) Alat Angkut (3.02)

Saldo Gabungan Alat Angkut pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.1.153.002.441,- (*satu miliar seratus lima puluh tiga juta dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal barang sebanyak 9 (*sembilan*) unit dengan nilai sebesar

Rp.1.153.002.441,- (*satu miliar seratus lima puluh tiga juta dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan tanpa mutasi kurang.

Nilai tersebut terdiri dari Intrakomptabel dengan sebesar Rp.1.153.002.441,- (*satu miliar seratus lima puluh tiga juta dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 9 (*sembilan*) unit dan tanpa Nilai Ekstrakomptabel.

Dari jumlah di atas, tidak terdapat Alat Angkut yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, maupun sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah Alat Angkut di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	9	1.153.002.441
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tidak terdapat kelompok barang berupa Alat Angkut yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2) Alat Bengkel (3.03)

Saldo Gabungan Alat Bengkel Tak bermesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.791.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal barang sebanyak 1 (*satu*) unit dengan nilai sebesar Rp.791.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), tanpa mutasi tambah dan tanpa mutasi kurang.

Nilai tersebut terdiri dari Ekstrakomptabel sebesar Rp.791.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 1 (*satu*) unit dan tanpa Nilai intrakomptabel.

Dari jumlah di atas, tidak terdapat Alat Bengkel yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, maupun sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah Alat Bengkel di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	1	791.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tidak terdapat kelompok barang berupa Alat Bengkel yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

3) Alat Kantor (3.05)

Saldo Gabungan Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.1.717.290.920,- (*satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 437 (empat ratus tiga puluh) buah, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai Rp.1.717.290.920,- (*satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 437 (empat ratus tiga puluh) buah, tanpa mutasi tambah dan tanpa mutasi kurang.

Nilai Gabungan Alat Kantor tersebut terdiri dari Nilai Intrakomptabel sebesar Rp.1.688.790.920,- (*satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 391 (*tiga ratus sembilan puluh satu*) buah, dan nilai Ekstrakomptabel sebesar Rp.28.500.000,- (*dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 46 (empat puluh enam) buah.

Tidak terdapat Alat Kantor di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, maupun sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah Alat Kantor di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	420	1.707.363.920
Rusak Ringan	17	9.927.000
Rusak Berat	0	0

Tidak terdapat Alat Kantor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

4) Alat Studio (3.06)

Saldo Gabungan Alat Studio pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.111.629.500,- (*seratus sebelas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 15 (lima belas) buah, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.111.629.500,- (*seratus sebelas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 15 (lima belas) buah, tanpa mutasi tambah dan tanpa mutasi kurang.

Nilai tersebut terdiri dari nilai Intrakomptabel sebesar Rp.107.062.000,- (*seratus tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 10 (sepuluh) buah, dan nilai Ekstrakomptabel sebesar Rp.4.567.500,- (*empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 5 (empat) buah.

Tidak terdapat Alat Studio di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah Alat Studio di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	15	111.629.500
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tidak terdapat Alat Studio yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

5) Alat Khusus Kepolisian (3.09)

Saldo Gabungan Alat Khusus Kepolisian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.1.296.480,- (*satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 1 (satu) buah, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.1.296.480,- (*satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 1 (satu) buah, tanpa mutasi tambah dan tanpa mutasi kurang.

Nilai tersebut terdiri dari nilai Intrakomptabel sebesar Rp.1.296.480,- (*satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 1 (satu) buah, dan tanpa nilai Ekstrakomptabel.

Tidak terdapat Alat Khusus Kepolisian di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah Alat Khusus Kepolisian di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	1	1.296.480
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tidak terdapat Alat Khusus Kepolisian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

6) Komputer (3.10)

Saldo Gabungan Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.1.130.223.990,- (*satu milyar seratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 112 (seratus dua belas) unit, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.1.110.373.990,- (*satu milyar seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 111 (seratus sebelas) unit, terdapat mutasi tambah sebesar Rp.19.850.000 (*sembilan belas juta delapan ratus lima puluh rupiah*) dengan jumlah barang 1 (satu) unit dan tanpa mutasi kurang.

Nilai tersebut terdiri dari nilai Intrakomptabel sebesar Rp.1.116.271.990,- (*satu milyar seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 94 (sembilan puluh empat) buah, dan nilai Ekstrakomptabel sebesar Rp.13.952.000,- (*tiga belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 18 (delapan belas) unit.

Tidak terdapat Komputer di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah Komputer di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	112	1.130.223.990
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tidak terdapat Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

1) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Nilai Gabungan)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	3.02 Alat Angkut	1.153.002.441	(740.811.651)	412.190.790
2	3.03 Alat Bengkel	791.000	(316.400)	474.600
3	3.05 Alat Kantor	1.717.290.920	(1.635.744.520)	81.546.400
4	3.06 Alat Studio	111.629.500	(68.639.600)	42.989.900
5	3.09 Alat Khusus KepolisianKc	1.296.480	(324.120)	972.360
6	3.10 Komputer	1.130.223.990	(984.767.990)	145.456.000
	Total	4.114.234.331	(3.430.604.281)	683.630.050

2) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Nilai Intrakomptabel)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	3.02 Alat Angkut	1.153.002.441	(740.811.651)	412.190.790
2	3.05 Alat Kantor	1.688.790.920	(1.622.656.520)	66.134.400
3	3.06 Alat Studio	107.062.000	(66.097.600)	40.964.400
	3.09 Alat Khusus KepolisianKc	1.296.480	(324.120)	972.360
4	3.10 Komputer	1.116.271.990	(976.686.490)	139.585.500
	Total	4.066.423.831	(3.406.576.381)	659.847.450

3) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Nilai Ekstrakomptabel)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	3.03 Alat Bengkel	791.000	(316.400)	474.600
2	3.05 Alat Kantor	28.500.000	(13.088.000)	15.412.000
3	3.06 Alat Studio	4.567.500	(2.542.000)	2.025.500
4	3.10 Komputer	13.952.000	(8.081.500)	5.870.500
	Total	47.810.500	(24.027.900)	23.782.600

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Gabungan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.7.974.883.632,- (*tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*) dengan jumlah bangunan sebanyak 13 (tiga belas) unit. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.7.974.883.632,- (*tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*) dengan jumlah bangunan sebanyak 13 (tiga belas) unit dan tanpa mutasi.

Saldo Nilai Gabungan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 terdiri dari nilai Intrakomptabel sebesar Rp.7.919.067.632,- (*tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*) dengan jumlah bangunan sebanyak 12 (dua belas) unit, dan nilai Ekstrakomptabel sebesar Rp.55.816.000,- (*lima puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*) dengan jumlah bangunan sebanyak 1 (satu) unit.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Gabungan Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 0 Juni 2023 sebesar Rp.7.654.748.632,- (*tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*) dengan jumlah bangunan sebanyak 12 (dua belas) unit. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.7.654.748.632,- (*tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*) dengan jumlah bangunan sebanyak 12 (dua belas) unit dan tanpa mutasi.

Saldo Nilai Gabungan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 terdiri dari nilai Intrakomptabel sebesar Rp.7.569.488.000,- (*tujuh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*), dan nilai Ekstrakomptabel sebesar Rp.55.816.000,- (*lima puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*).

Tidak terdapat Bangunan Gedung di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Tidak terdapat Bangunan Gedung sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	12	7.654.748.632
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tidak terdapat Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2) Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.320.135.000,- (*tiga ratus dua puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dengan jumlah bangunan sebanyak 1 (satu) unit. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.320.135.000,- (*tiga ratus dua puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dengan jumlah bangunan sebanyak 1 (satu) unit dan tidak terdapat mutasi.

Saldo Nilai Gabungan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 terdiri dari nilai Intrakomptabel sebesar Rp.320.135.000,- (*tiga ratus dua puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*), dan tidak terdapat nilai Ekstrakomptabel.

Tidak terdapat Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Tidak terdapat Tugu Titik Kontrol/ Pasti sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/ Pasti di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	1	320.135.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tidak terdapat Tugu Titik Kontrol/Pasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

1) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Nilai Gabungan)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	4.01 Bangunan Gedung	7.654.748.632	(1.108.674.090)	6.546.074.542
2	4.04 Tugu Titik Kontrol/Pasti	320.135.000	(41.724.588)	278.410.412
	Total	7.974.883.632	(1.150.398.678)	6.824.484.954

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Nilai Intrakomptabel)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	4.01 Bangunan Gedung	7.598.932.632	(1.090.812.970)	6.508.119.662
2	4.04 Tugu Titik Kontrol/Pasti	320.135.000	(41.724.588)	278.410.412
	Total	7.919.067.632	(1.132.537.558)	6.786.530.074

3) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Nilai Ekstrakomptabel)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	4.01 Bangunan Gedung	55.816.000	(17.861.120)	37.954.880
	Total	55.816.000	(17.861.120)	37.954.880

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.192.064.950,- (*seratus sembilan puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), saldo awal sebesar Rp.192.064.950,- (*seratus sembilan puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), dan tidak terdapat mutasi.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Jaringan (5.04)

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.192.064.950,- (*seratus sembilan puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*). Saldo tersebut terdiri dari nilai intrakomptabel sebesar Rp.192.064.950,- (*seratus sembilan puluh dua juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), dan tidak terdapat mutasi.

Tidak terdapat Jaringan di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Tidak terdapat Jaringan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah Jaringan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	1	192.064.950
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tidak terdapat kelompok barang Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

1) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Nilai Gabungan)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	5.04 Jaringan	192.064.950	(31.210.556)	160.854.394
	Total	192.064.950	(31.210.556)	160.854.394

2) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Nilai Intrakomptabel)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	5.04 Jaringan	192.064.950	(31.210.556)	160.854.394
	Total	192.064.950	(31.210.556)	160.854.394

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo nilai Gabungan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.5.717.078,- (*lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh puluh delapan rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 39 (*tiga puluh sembilan*) buah. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.5.717.078,- (*lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh puluh delapan rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 39 (*tiga puluh sembilan*) buah, dan tidak terdapat mutasi.

Saldo nilai Gabungan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 terdiri dari nilai Intrakomptabel sebesar Rp.5.717.078,- (*lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh puluh delapan rupiah*), dan tidak terdapat nilai Ekstrakomptabel.

1) Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo nilai Gabungan Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.5.717.078,- (*lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh puluh delapan rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 39 (*tiga puluh sembilan*) buah. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.5.717.078,- (*lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh puluh delapan rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 39 (*tiga puluh sembilan*) buah, dan tidak terdapat mutasi.

Saldo nilai Gabungan Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 terdiri dari nilai Intrakomptabel sebesar Rp.5.717.078,- (*lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh puluh delapan rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 39 (*tiga puluh sembilan*) buah, dan tidak terdapat nilai Ekstrakomptabel.

Tidak terdapat Bahan Perpustakaan di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga

Tidak terdapat Bahan Perpustakaan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (buah)	Nilai (Rp)
Baik	39	5.717.078
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tidak terdapat Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per Juni 2023 adalah sebagai berikut :

1) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (Nilai Gabungan)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Bahan Perpustakaan	5.717.078	0	5.717.078
	Total	5.717.078	0	5.717.078

2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (Nilai Intrakomptabel)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Bahan Perpustakaan	5.717.078	0	5.717.078
	Total	5.717.078	0	5.717.078

g. Aset Lainnya

Saldo Nilai Gabungan Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.98.890.000,- (*sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 1 (satu) buah. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.98.890.000,- (*sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 1 (satu) buah, dan tidak terdapat mutasi.

1) Aset tak Berwujud

Saldo Aset tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.98.890.000,- (*sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 1 (satu) buah. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.98.890.000,- (*sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dengan jumlah barang sebanyak 1 (satu) buah, dan tidak terdapat mutasi.

Tidak terdapat Aset tak Berwujud di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Tidak terdapat Aset Tak Berwujud sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Tidak terdapat Aset tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2) Akumulasi Amortisasi Software / Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Akumulasi Amortisasi Aset	98.890.000	(98.890.000)	0
	Total	98.890.000	(98.890.000)	0

3. Barang Milik Negara

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 sebesar Rp.24.482.438.412,- (*dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah*). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
A	Aset Lancar						
1	Persediaan	8.758.900	0,03%	0	0,00%	8.758.900	0,03%
	Sub Jumlah	8.758.900	0,03%	0	0,00%	8.758.900	0,03%
B	Aset Tetap						
1	Tanah	16.798.993.000	57,75%	0	0,00%	16.798.993.000	57,54%
2	Peralatan dan Mesin	4.066.423.831	13,98%	47.810.500	46,14%	4.114.234.331	14,09%
3	Gedung dan Bangunan	7.919.067.632	27,22%	55.816.000	53,86%	7.974.883.632	27,32%
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	192.064.950	0,66%	0	0,00%	192.064.950	0,66%
5	Aset Tetap Lainnya	5.717.078	0,02%	0	0,00%	5.717.078	0,02%
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Sub Jumlah	28.982.266.491	99,63%	103.626.500	100,00%	29.085.892.991	99,63%
C	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Aset tak Berwujud	98.890.000	0,34%	0	0,00%	98.890.000	0,34%
3	Aset yang dihentikan penggunaan operasional pemerintah	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Sub Jumlah	98.890.000	0,34%	0	0,00%	98.890.000	0,34%
	Total	29.089.915.391	100,00%	103.626.500	100,00%	29.193.541.891	100,00%

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

Uraian Neraca	Intrakomptabel		ekstrakomptabel		Gabungan	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Aset Tetap						
Peralatan mesin	(3.406.576.381)	72,96%	(24.027.900)	57,36%	(3.430.604.281)	72,82%
Gedung dan Bangunan	(1.132.537.558)	24,26%	(17.861.120)	42,64%	(1.150.398.678)	24,42%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(31.210.556)	0,67%	0	0,00%	(31.210.556)	0,66%
Aset Tetap Lainnya	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Aset Lainnya	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Aset Tak Berwujud	(98.890.000)	2,12%	0	0,00%	(98.890.000)	2,10%
Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total	(4.669.214.495)	100,00%	(41.889.020)	100,00%	(4.711.103.515)	100,00%

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilatan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 per akun neraca adalah sebagai berikut :

Nama Aset	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
Persediaan	8.758.900	8.758.900	0
Tanah	16.798.993.000	16.798.993.000	0
Peralatan dan Mesin	4.066.423.831	4.066.423.831	0
Gedung dan Bangunan	7.919.067.632	7.919.067.632	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	192.064.950	192.064.950	0
Aset Tetap Lainnya	5.717.078	5.717.078	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Aset tak Berwujud	98.890.000	98.890.000	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Total	29.089.915.391	29.089.915.391	0

V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

NO	PERIODE LAPORAN	NILAI BMN (RP)	PERKEMBANGAN	
			RUPIAH	PERSEN (%)
1	2019	24.865.573.943	140.197.387	0,57%
2	2020	25.188.061.942	322.487.999	1,30%
3	2021	25.024.747.387	-163.314.555	-0,65%
4	2022	24.693.047.027	-331.700.360	-1,33%
5	SMT I 2023	24.482.438.412	-210.608.615	-0,85%

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN
		(RP)	(RP)
1	TANAH	16.798.993.000	0
2	PERALATAN DAN MESIN	2.993.545.489	1.053.028.342
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	7.945.439.000	0
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	192.064.950	0
5	ASET TETAP LAINNYA	5.527.078	190.000
6	ASET LAIN-LAIN	98.890.000	0
	JUMLAH	20.096.965.956	1.053.218.342

Keterangan :

1. BMN berupa Peralatan dan Mesin yang belum ditetapkan status penggunaannya akan diajukan Penetapan Status Penggunaannya pada periode Tahun Anggaran 2023.

b. Pengelolaan BMN

Tidak terdapat BMN dalam proses pelaksanaan pengelolaan.

c. Pengelolaan BMN Idle

Tidak terdapat BMN dalam proses pengelolaan BMN Idle.

2. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang**a. Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang**

Tidak terdapat BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023.

b. Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang

Tidak terdapat BMN dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023.

3. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN :

1. Aplikasi yang terus berubah mendekati atau saat pelaksanaan rekonsiliasi yang mengganggu pelaksanaan / merubah data.
2. Pemahaman yang kurang atas akun barang milik Negara maupun akun persediaan yang belum.
3. Pemahaman yang kurang atas kode barang milik Negara maupun kode barang persediaan yang belum.
4. Jumlah/total nilai intrakomptabel dan gabungan intra/ekstrakomptabel pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna semesteran tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya (nilai penyusutan/amortisasi aset tak berwujud ikut dalam penjumlahan).

4. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Segera mengupdate aplikasi sesuai dengan runutan terbaru dan melakukan rekon ulang jika terjadi perubahan.
2. Memahami seluk beluk aplikasi dan pengkodefikasian BMN dan barang Persediaan.
3. Terus berkomunikasi dengan Koordinator Wilayah, Eselon I dan KPKNL setempat dalam penyelesaian permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan Penatausahaan BMN.
4. Terus memonitoring setiap usulan yang dikirim melalui Pengadilan Tingkat Banding, baik Penetapan Status Penggunaan BMN maupun Penghapusan BMN.

Penanggungjawab
Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023
Kuasa Pengguna Barang,



EPI RANDABUNGA RUNGNGU, S.E.
NIP. 19790204 200502 2 001